

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi persaingan era globalisasi, menuntut peran aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk tanggap dan memiliki kesiapan dalam mengantisipasi dampak dari globalisasi ini. Oleh karena itu menyiapkan kecerdasan masyarakat yang berkualitas, merupakan faktor penentu yang sangat penting dan strategis dalam menjaga eksistensi masa depan bangsa dan negara yang berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa, guna meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi, termasuk yang paling berat yaitu ancaman disintegrasi bangsa.

Menyadari konstelasi geografis dan pluralisme bangsa, sesungguhnya pembangunan wawasan kebangsaan adalah merupakan fondasi, dimana akan diletakkan dasar-dasar semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu tujuan politik yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh suatu negara, khususnya negara kebangsaan. Tanpa persatuan dan kesatuan, kiranya tujuan yang lebih luhur, seperti terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial, mustahil akan tercapai.

Oleh karena itu, diharapkan setiap elemen bangsa dapat bersama-sama dan tanpa hentinya melakukan upaya positif yang berkelanjutan, demi selalu

terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa secara berkesinambungan. Ketahanan dan kewaspadaan nasional serta rasa nasionalisme yang tinggi, sikap berbangga dan rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia merupakan hal yang mutlak dimiliki setiap generasi terutama generasi muda, sebagai penerus tongkat setafet perjuangan bangsa yang sudah demikian jauh. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, haruslah dijadikan landasan dan komitmen moral dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga hal-hal yang menjurus pada terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat dihindari.

Kebijakan Pemantapan Ideologi dan pembangunan wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diarahkan pada langkah-langkah kongkrit bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian aktualisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah merupakan partisipasi kebangsaan secara nyata oleh setiap warga bangsa dan komponen bangsa, atau sebagai indikator berperannya (memberikan kontribusi) dalam membangun bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mengangkat harkat dan martabat bangsa di tengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah nyata tentang pentingnya Pemantapan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, perlu dilaksanakan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di jajaran Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

B. DASAR HUKUM

1. TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tentang pentingnya penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna mencegah timbulnya disintegrasi bangsa.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini adalah, agar masyarakat Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota memperoleh data dan memahami tentang pentingnya pemantapan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah :

- a. Mendapatkan data yang akurat dari Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota tentang kegiatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan Aparatur Badan/kantor Kesbangpol kabupaten/Kota tentang pentingnya penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Kabupaten/Kota

BAB II PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini adalah mendapatkan data dari masyarakat dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten dan Kota di Daerah Sumatera Barat.

B. METODOLOGI

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Koordinasi secara langsung kepada Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data.
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumbar menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

C. PELAKSANAAN

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

a. Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk Tahun 2023 untuk 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu :

- Kabupaten Agam
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Tanah Datar

- Kabupaten Solok
 - Kabupaten Dharmasraya
 - Kabupaten Solok Selatan
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kabupaten Padang Pariaman
 - Kabupaten Pasaman
 - Kabupaten Pasaman Barat
 - Kabupaten Sijunjung
 - Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - Kota Padang
 - Kota Pariaman
 - Kota Bukittinggi
 - Kota Payakumbuh
 - Kota Solok
 - Kota Sawahlunto
 - Kota Padang Panjang
- b. Rapat Koordinasi dengan Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Rapat Koordinasi Peringatan Hari Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.
- d. Rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan didukung dengan dana sebesar Rp. 84.174.400,- (delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), dengan rincian dana sebagai berikut :

1. Belanja Barang Pakai Habis = Rp. 10.334.400,-
2. Belanja Jasa Kantor = Rp. 20.540.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas = Rp. 53.300.000,

BAB IV
PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kerja ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Setelah selesai Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Oktober 2022
KABID IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA



ADI DHARMA
Pembina Tingkat I
NIP. 19681016 198903 1 003

